

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Penetapan Renja SKPD Tahun Anggaran 2024 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817). Peraturan tersebut secara substansi mengamanatkan penyusunan Penetapan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Penetapan Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Tahun 2024, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan Renja Pembangunan Daerah (Penetapan Renja RKPD).

Penetapan Renja SKPD adalah dokumen Rancangan perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Penetapan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan RKPD.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran maka disusunlah Penetapan Renja Kecamatan Pangandaran tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan pembangunan SKPD tahunan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Penetapan Renja Tahun 2024 Kecamatan Pangandaran adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
27. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
33. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);

- 38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
- 39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
- 40. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan;
- 41. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
- 42. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38);
- 43. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 71);
- 44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 75 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 75);
- 45. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 77 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 77).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pangandaran yang telah menyusun Penetapan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) untuk tahun 2024 yang merupakan dokumen awal Perencanaan Kecamatan Pangandaran untuk periode 1 (satu) tahun dimaksudkan untuk menguraikan kegiatan-kegiatan Kecamatan Pangandaran secara sistematis mulai dari sasaran dan pembiayaan sesuai program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dengan indikator kinerja dan rencana tingkat pencapaian (target) secara langsung yang dapat terukur sebagai tindakan nyata dalam waktu satu tahun, yang selanjutnya dijadikan sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan tahunan di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Penetapan Rencana Kerja Tahun 2024, yaitu:

1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian Program dan Kegiatan pelayanan Kantor Kecamatan Pangandaran;
2. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan tahunan Kecamatan Pangandaran;
3. Terwujudnya keselarasan antara dokumen Rancangan perencanaan tahunan SKPD dengan dokumen Penetapan Renja Pembangunan Daerah (RKPD); dan
4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Penetapan Rencana Kerja Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Rancangan Rencana Kerja, landasan hukum penyusunan Rancangan Rencana Kerja, maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja dan sistematika penulisan dokumen Rancangan Rencana Kerja.

- 1.1 Latarbelakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap Rancangan RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, serta Program dan Kegiatan.

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa : catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu ditunjukkan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja SKPD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun tugas dan fungsi Kecamatan adalah:

- a) Perencanaan yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan data, penilaian dan penyusunan rencana program di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat serta pemerintahan desa.
- b) Pelaksanaan yang meliputi kegiatan pelayanan dan pembinaan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat serta pemerintahan desa.
- c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pokok seperti di atas.
- d) Melaksanakan tugas-tugas ketata usahaaan.
- e) Pengkoordinasian integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan kecamatan.
- f) Melaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan dinas/instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Jenis program dan kegiatan yang direncanakan didalam Renja Kecamatan Pangandaran berdasarkan Renstra Kecamatan Pangandaran Tahun 2021 – 2026 terdiri dari 4 Program, 12 Kegiatan, dan 29 Sub Kegiatan. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah perkiraan pelaksanaan DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan yang baru disahkan.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu

Pada tahun 2022 Kecamatan Pangandaran melaksanakan program dan kegiatan dengan dukungan anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran sebesar Rp 1.470.031.397,- (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), kemudian dilakukan penjabaran APBD sehingga menjadi Rp. 1.478.631.397,-(Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tuga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), kemudian pada saat anggaran perubahan menjadi Rp 1.503.631.397 (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Juta

Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.400.378.710 atau persentase sebesar 93,13%.

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dapat dilihat rinciannya yang disajikan dalam Tabel T-C.29 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kecamatan Pangandaran, sebagai berikut :

TABEL T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Pangandaran

Kecamatan Pangandaran

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	Unsur Kewilayahan									
7.01	Kecamatan Pangandaran									
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100%							
		2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100%							
		3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100%							
		4. Persentase perencanaan dan	100%							

		evaluasi kinerja yang berkualitas								
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	100%							
		2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	100%							
		3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	100%							
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38 Dokumen	7 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	4 Dokumen	16 Dokumen	0,42
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100%							
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/Bulan	9 Orang/Bulan	9 Orang/Bulan	8 Orang/Bulan	100%	10 Orang/Bulan	27 Orang/Bulan	0,45
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	360 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	100%	60 Dokumen	180 Dokumen	0,50

7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0%	1 Laporan	1 Laporan	0,20
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	25 Laporan	5 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0%	5 Laporan	10 Laporan	0,40
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	100%							
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	72 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	0,50
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	100%							
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas	6 Paket	0 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	2 Paket	0,33

		beserta Atribut Kelengkapan								
7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	72 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	36 Dokumen	0,50
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	51 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	10 Orang	10 Orang	0,20
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	100%							
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	0,50
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	0,50
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	0,50
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	288 Dokumen	48 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	100%	48 Dokumen	111 Dokumen	0,39

7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0%	1 Paket	1 Paket	0,25
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.357 Laporan	2 Laporan	12 Laporan	13 Laporan	108,33%	326 Laporan	341 Laporan	0,25
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	100%							
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	5 Unit	5 Unit	0,05
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22 Unit	0 Unit	1 Unit	2 Unit	200%	12 Unit	14 Unit	0,64
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	37 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0 Unit	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100%							
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.320 Laporan	240 Laporan	120 Laporan	120 Laporan	100%	240 Laporan	600 Laporan	0,45

7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	100%	24 Laporan	72 Laporan	0,50
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	0,50
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	100%							
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	15 Unit	0,47
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	84 Unit	3 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	14 Unit	27 Unit	0,32
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	1 Unit	2 Unit	0,40
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%							

7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%							
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	40 Laporan	4 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0%	12 Laporan	16 Laporan	0,40
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%							
7.01.02.2.02.01	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24 Laporan	10 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	18 Laporan	0,75
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%							

7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%							
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	42 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	100%	7 Lembaga Kemasyarakatan	21 Lembaga Kemasyarakatan	0,50
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum	100%							
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%							
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	42 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0%	0 Laporan	0 Laporan	-
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%							
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100%							

7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	42 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	-
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%							
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%							
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	24 Dokumen	10 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	18 Dokumen	0,75
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	5 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	2 Dokumen	0,40
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	24 Laporan	10 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Dokumen	18 Laporan	0,75

Pangandaran, 14 Januari 2023

Camat Pangandaran

The image shows a circular official stamp of the Pangandaran District Office. The text around the perimeter of the stamp reads "KABUPATEN PANGANDARAN" at the top and "PANGANDARAN" at the bottom. In the center of the stamp, there is a handwritten signature in blue ink. The signature appears to be "DENI RAMDANI".

DENI RAMDANI, S.Sos
NIP. 19660121 198801 1 002

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Capaian Kinerja Kecamatan Pangandaran berdasarkan sasaran strategis dilakukan dengan perbandingan antara target dengan realisasi kinerja Tahun 2022, sasaran dari capaian kinerja meliputi:

- Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
- Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
- Meningkatnya kinerja penyelenggaraan peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan Desa;

Untuk lebih rincinya disajikan dalam Tabel T-C.30: Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, sebagai berikut:

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangandaran
Kabupaten Pangandaran

No	Indikator	SPM/ Standar dan Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Capaian Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Nilai LHE AKIP Kecamatan Pangandaran			88.80 %	89.00 %	89.20 %	89.40 %	88.60 %	43.80 %	67.72 %	89.40 %	
2.	Indeks Pelayanan Publik			75.00 %	80.00 %	85.00 %	90.00 %	89.00 %	90.55 %	90.00 %	92.00 %	
3.	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5.	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6.	Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7.	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8.	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pangandaran bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut:

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Pangandaran;
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company / Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu SPM (Standar Pelayanan Minimal) dimana pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat mencapai MDGs (Millenium Develompment Goals);
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
5. Arah Kebijakan dan potensi wisata yang cukup layak untuk dikembangkan, maka Kecamatan Pangandaran harus betul-betul memanfaatkan posisi dan potensi yang dimiliki, guna mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap Rancangan RKPD dapat diketahui dari pencapaian realisasi anggaran pada tahun 2022 yaitu 93,13%, hal tersebut menandakan bahwa pelaksanaan terhadap Rancangan dapat direalisasikan. Dalam menunjang pelaksanaan Rancangan RKPD menurut identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan setelah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai

Untuk lebih rincinya disajikan dalam Tabel T-C.31: Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2024 Kecamatan Pangandaran.

**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Pangandaran**

Nama SKPD : Kecamatan Pangandaran

Tabel T-C.31

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kecamatan Pangandaran				2.910.104.104	Kecamatan Pangandaran				2.910.104.104	
	Umum				2.910.104.104	Umum				2.910.104.104	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Pangandaran			2.533.266.504	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.533.266.504	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Kec. Pangandaran			51.620.698	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Kec. Pangandaran			51.620.698	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Pangandaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	14 Dokumen	44.350.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Pangandaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	14 Dokumen	44.350.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Pangandaran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	1.509.790	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Pangandaran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	1.509.790	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Pangandaran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 Dokumen	1.509.790	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Pangandaran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 Dokumen	1.509.790	

	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Pangandaran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6 Dokumen	1.509.790	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Pangandaran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6 Dokumen	1.509.790	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. Pangandaran	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6 Dokumen	1.509.790	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. Pangandaran	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6 Dokumen	1.509.790	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Pangandaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1.231.538	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Pangandaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1.231.538	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Pangandaran			1.805.513.218	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Pangandaran	0	0	1.805.513.218	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Pangandaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang / 14 Bulan	1.734.251.470	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Pangandaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang / 14 Bulan	1.734.251.470	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Pangandaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	44.350.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Pangandaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	44.350.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Pangandaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	1.171.748	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Pangandaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	1.171.748	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Pangandaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	25.740.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Pangandaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	25.740.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Pangandaran			48.553.900	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Pangandaran			48.553.900	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Pangandaran	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	4.203.900	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Pangandaran	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	4.203.900	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Pangandaran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	44.350.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Pangandaran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	44.350.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Pangandaran			110.796.096	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Pangandaran			110.796.096	

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Pangandaran	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	26 Stel	12.629.768	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Pangandaran	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	26 Stel	12.629.768	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kec. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	10 Dokumen	30.125.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	10 Dokumen	30.125.000	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kec. Pangandaran	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	26 Dokumen	3.041.328	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kec. Pangandaran	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	26 Dokumen	3.041.328	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Pangandaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	65.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Pangandaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	65.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Pangandaran			104.248.585	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Pangandaran	0	0	104.248.585	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Pangandaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2.655.920	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Pangandaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2.655.920	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Pangandaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45 Paket	23.887.108	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Pangandaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45 Paket	23.887.108	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Pangandaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	12.195.100	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Pangandaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	12.195.100	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Pangandaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	6 Dokumen	14.758.536	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Pangandaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	6 Dokumen	14.758.536	
	Penyediaan Bahan / Material	Kec. Pangandaran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	8.431.921	Penyediaan Bahan / Material	Kec. Pangandaran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	8.431.921	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	326 Laporan	42.320.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	326 Laporan	42.320.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Pangandaran			78.315.698	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Pangandaran	0	0	78.315.698	
	Pengadaan Mebel	Kec. Pangandaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	24.140.366	Pengadaan Mebel	Kec. Pangandaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	24.140.366	

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Pangandaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	42.183.310	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	42.183.310	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Pangandaran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	11.992.022	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Pangandaran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	11.992.022	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Pangandaran			266.086.364	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Pangandaran	0	0	266.086.364	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	240 Laporan	4.050.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	240 Laporan	4.050.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	42.163.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	42.163.000	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	219.873.364	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	219.873.364	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Pangandaran			68.131.945	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Pangandaran	0	0	68.131.945	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Pangandaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	52.831.945	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	52.831.945	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Pangandaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	12.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Pangandaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	12.000.000	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Pangandaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.300.000	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Pangandaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.300.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Pangandaran	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	304.572.800	PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Pangandaran	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	304.572.800	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Pangandaran			279.405.000	Koordinasi Penyelenggara an Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Pangandaran	0	0	279.405.000	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Pangandaran	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	279.405.000	Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Pangandaran	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	279.405.000	

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec. Pangandaran			25.167.800	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec. Pangandaran	0	0	25.167.800	
	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Pangandaran	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Kali	25.167.800	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Pangandaran	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Kali	25.167.800	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Pangandaran			3.340.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Pangandaran	0	0	3.340.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Pangandaran			3.340.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Pangandaran	0	0	3.340.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Pangandaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 LSM	3.340.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Pangandaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 LSM	3.340.000	

	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Pangandaran			1.065.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Pangandaran	0	0	1.065.000	
	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	Kec. Pangandaran			1.065.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		0	0	1.065.000	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Pangandaran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8 Laporan	1.065.000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8 Laporan	1.065.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Pangandaran			2.040.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Pangandaran	0	0	2.040.000	
	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	Kec. Pangandaran			2.040.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Pangandaran	0	0	2.040.000	

	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kec. Pangandaran	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	7 Dokumen	2.040.000	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kec. Pangandaran	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	7 Dokumen	2.040.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Pangandaran			65.819.800	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Pangandaran	0	0	65.819.800	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Pangandaran			65.819.800	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Pangandaran	0	0	65.819.800	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Pangandaran	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	14.560.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	14.560.000	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Pangandaran	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	6 Dokumen	36.959.800,00	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Pangandaran	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	6 Dokumen	36.959.800	

Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kec. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	14.300.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kec. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	14.300.000
---	------------------	--	-----------	---------------	---	------------------	--	-----------	------------

Pangandaran, Agustus 2023
 CAMAT PANGANDARAN

DENI RAMDANI, S.Sos
 NIP. 19720918 200212 1 004

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2024, yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Kantor Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi. Informasi tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan terhadap keinginan masyarakat dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan musrenbang kabupaten.

Penelaahan / review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat dalam bentuk hasil musrenbang untuk Kecamatan Pangandaran tidak ada usulan.

Untuk lebih rincinya disajikan dalam Tabel T-C.32: Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Pangandaran

Kecamatan Pangandaran

Tabel T-C.32

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
	<i>NIHIL</i>				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

a. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam Rancangan RKPD, yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2024 yang terkait dengan pembangunan seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastuktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi, politik dan keamanan.

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Pangandaran dalam kurun waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

b. Telaahan Terhadap Kebijakan Kabupaten

Visi & Misi Bupati Pangandaran 2021-2026

Visi :

“Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa”

Misi :

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama;
2. Mengembangkan wisata dengan memperluas akses dan penataan berkelanjutan;
3. Mengembangkan aksesibilitas kesehatan dan pendidikan sampai perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan;
4. Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal;
5. Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien dan akuntabel;
6. Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024

1. Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja;
2. Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif;
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting;
4. Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan;
5. Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi;
6. Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Pangandaran

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Pangandaran mempunyai arah yang dijelaskan sebagai berikut :

Tujuan : 1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

Sasaran : a. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Pangandaran maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- 4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- 6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran Berjalan 2023 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan :
 - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, meliputi kegiatan :
 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, meliputi kegiatan :
 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, meliputi kegiatan :
 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, meliputi kegiatan :
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, meliputi kegiatan :
 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Untuk lebih rincinya disajikan dalam Tabel T-C.33 : Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 Dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Kecamatan Pangandaran

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Pangandaran**

Nama SKPD : Kecamatan Pangandaran

Tabel T-C.33

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana (APBD)		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)
7					Unsur Kewilayahan								
7	1				Kecamatan Pangandaram				2.910.104.104				3.201.114.514
7	1	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Kec. Pangandaran		2.533.266.504	APBD Kab			2.786.593.154
7	1	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi		Kec. Pangandaran		51.620.698	APBD Kab			56.782.768
7	1	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Kec. Pangandaran	14 Dokumen	44.350.000	APBD Kab		14 Dokumen	48.785.000
7	1	01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Pangandaran	6 Dokumen	1.509.790	APBD Kab		6 Dokumen	1.660.769
7	1	01	201	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Pangandaran	6 Dokumen	1.509.790	APBD Kab		6 Dokumen	1.660.769

7	1	01	201	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. Pangandaran	6 Dokumen	1.509.790	APBD Kab		6 Dokumen	1.660.769
7	1	01	201	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Pangandaran	6 Dokumen	1.509.790	APBD Kab		6 Dokumen	1.660.769
7	1	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Pangandaran	5 Laporan	1.231.538	APBD Kab		5 Laporan	1.354.692
7	1	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kec. Pangandaran		1.805.513.218	APBD Kab			1.986.064.540
7	1	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Pangandaran	11 Orang / 14 Bulan	1.734.251.470	APBD Kab		11 Orang / 14 Bulan	1.907.676.617
7	1	01	202	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Pangandaran	60 Dokumen	44.350.000	APBD Kab		60 Dokumen	48.785.000
7	1	01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Pangandaran	5 Laporan	1.171.748	APBD Kab		5 Laporan	1.288.923

7	1	01	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Pangandaran	4 Laporan	25.740.000	APBD Kab		4 Laporan	28.314.000
7	1	01	203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Kec. Pangandaran		48.553.900	APBD Kab			53.409.290
7	1	01	203	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Pangandaran	12 Laporan	4.203.900	APBD Kab		12 Laporan	4.624.290
7	1	01	203	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Pangandaran	12 Laporan	44.350.000	APBD Kab		12 Laporan	48.785.000
7	1	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kec. Pangandaran		110.796.096	APBD Kab			121.875.706
7	1	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	Kec. Pangandaran	26 Stel	12.629.768	APBD Kab		26 Stel	13.892.745
7	1	01	205	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kec. Pangandaran	10 Dokumen	30.125.000	APBD Kab		10 Dokumen	33.137.500
7	1	01	205	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kec. Pangandaran	26 Dokumen	3.041.328	APBD Kab		26 Dokumen	3.345.461

7	1	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kec. Pangandaran	11 Orang	65.000.000	APBD Kab		11 Orang	71.500.000
7	1	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kec. Pangandaran		104.248.585	APBD Kab			114.673.444
7	1	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Pangandaran	5 Paket	2.655.920	APBD Kab		5 Paket	2.921.512
7	1	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Pangandaran	45 Paket	23.887.108	APBD Kab		45 Paket	26.275.819
7	1	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Pangandaran	4 Paket	12.195.100	APBD Kab		4 Paket	13.414.610
7	1	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kec. Pangandaran	6 Dokumen	14.758.536	APBD Kab		6 Dokumen	16.234.390
7	1	01	206	07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kec. Pangandaran	5 Paket	8.431.921	APBD Kab		5 Paket	9.275.113
7	1	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Pangandaran	326 Laporan	42.320.000	APBD Kab		326 Laporan	46.552.000
7	1	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kec. Pangandaran		78.315.698	APBD Kab			86.147.268
7	1	01	207	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kec. Pangandaran	20 Unit	24.140.366	APBD Kab		20 Unit	26.554.403
7	1	1	207	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Pangandaran	8 Unit	42.183.310	APBD Kab		8 Unit	46.401.641

7	1	01	207	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Pangandaran	1 Unit	11.992.022	APBD Kab		1 Unit	13.191.224
7	1	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kec. Pangandaran		266.086.364	APBD Kab			292.695.000
7	1	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Pangandaran	240 Laporan	4.050.000	APBD Kab		240 Laporan	4.455.000
7	1	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Pangandaran	4 Laporan	42.163.000	APBD Kab		4 Laporan	46.379.300
7	1	1	208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Pangandaran	3 Laporan	219.873.364	APBD Kab		3 Laporan	241.860.700
7	1	1	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kec. Pangandaran		68.131.945	APBD Kab			74.945.140
7	1	1	209	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Pangandaran	3 Unit	52.831.945	APBD Kab		3 Unit	58.115.140
7	1	1	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Pangandaran	14 Unit	12.000.000	APBD Kab		14 Unit	13.200.000
7	1	1	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Pangandaran	1 Unit	3.300.000	APBD Kab		1 Unit	3.630.000

7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Pangandaran	100	304.572.800	APBD Kab		100	335.030.080
7	1	2	201		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kec. Pangandaran		279.405.000	APBD Kab			307.345.500
7	1	2	201	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Pangandaran	12 Laporan	279.405.000	APBD Kab		12 Laporan	307.345.500
7	1	2	202		<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>		Kec. Pangandaran		25.167.800	APBD Kab			27.684.580
7	1	2	202	3	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Pangandaran	12 Kali	25.167.800	APBD Kab		12 Kali	27.684.580
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Kec. Pangandaran		3.340.000	APBD Kab			3.674.000
7	1	3	201		<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>		Kec. Pangandaran		3.340.000	APBD Kab			3.674.000
7	1	3	201	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Pangandaran	8 LSM	3.340.000	APBD Kab		8 LSM	3.674.000

7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Kec. Pangandaran		1.065.000	APBD Kab			1.171.500
7	1	4	201		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Kec. Pangandaran		1.065.000	APBD Kab			1.171.500
7	1	4	201	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Pangandaran	8 Laporan	1.065.000	APBD Kab		8 Laporan	1.171.500
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Kec. Pangandaran		2.040.000	APBD Kab			2.244.000
7	1	5	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Kec. Pangandaran		2.040.000	APBD Kab			2.244.000
7	1	5	201	7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kec. Pangandaran	7 Dokumen	2.040.000	APBD Kab		7 Dokumen	2.244.000
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Kec. Pangandaran		65.819.800	APBD Kab			72.401.780
7	1	6	201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Kec. Pangandaran		65.819.800	APBD Kab			72.401.780
7	1	6	201	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Pangandaran	8 Dokumen	14.560.000	APBD Kab		8 Dokumen	16.016.000

7	1	6	201	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Pangandaran	6 Dokumen	36.959.800,00	APBD Kab		6 Dokumen	40.655.780
7	1	6	201	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kec. Pangandaran	4 Laporan	14.300.000,00	APBD Kab		4 Laporan	15.730.000

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Pangandaran**

Nama SKPD : Kecamatan Pangandaran

Tabel T-C.33

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
					Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana (APBD)		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)
7				Unsur Kewilayahan								
1				Kecamatan								
1	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Kec. Pangandaran		2.533.266.504	APBD Kab			2.786.593.154
1	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi		Kec. Pangandaran		51.620.698	APBD Kab			56.782.768
1	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Kec. Pangandaran	14 Dokumen	44.350.000	APBD Kab		14 Dokumen	48.785.000

1	01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Pangandaran	6 Dokumen	1.509.790	APBD Kab		6 Dokumen	1.660.769
1	01	201	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Pangandaran	6 Dokumen	1.509.790	APBD Kab		6 Dokumen	1.660.769
1	01	201	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. Pangandaran	6 Dokumen	1.509.790	APBD Kab		6 Dokumen	1.660.769
1	01	201	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Pangandaran	6 Dokumen	1.509.790	APBD Kab		6 Dokumen	1.660.769
1	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Pangandaran	5 Laporan	1.231.538	APBD Kab		5 Laporan	1.354.692
1	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kec. Pangandaran		1.805.513.218	APBD Kab			1.986.064.540
1	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Pangandaran	11 Orang / 14 Bulan	1.734.251.470	APBD Kab		11 Orang / 14 Bulan	1.907.676.617
1	01	202	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Pangandaran	60 Dokumen	44.350.000	APBD Kab		60 Dokumen	48.785.000

1	01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Pangandaran	5 Laporan	1.171.748	APBD Kab		5 Laporan	1.288.923
1	01	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Pangandaran	4 Laporan	25.740.000	APBD Kab		4 Laporan	28.314.000
1	01	203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Kec. Pangandaran		48.553.900	APBD Kab			53.409.290
1	01	203	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Pangandaran	12 Laporan	4.203.900	APBD Kab		12 Laporan	4.624.290
1	01	203	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Pangandaran	12 Laporan	44.350.000	APBD Kab		12 Laporan	48.785.000
1	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kec. Pangandaran		110.796.096	APBD Kab			121.875.706
1	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	Kec. Pangandaran	26 Stel	12.629.768	APBD Kab		26 Stel	13.892.745
1	01	205	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kec. Pangandaran	10 Dokumen	30.125.000	APBD Kab		10 Dokumen	33.137.500

1	01	205	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kec. Pangandaran	26 Dokumen	3.041.328	APBD Kab		26 Dokumen	3.345.461
1	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kec. Pangandaran	11 Orang	65.000.000	APBD Kab		11 Orang	71.500.000
1	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kec. Pangandaran		104.248.585	APBD Kab			114.673.444
1	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Pangandaran	5 Paket	2.655.920	APBD Kab		5 Paket	2.921.512
1	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Pangandaran	45 Paket	23.887.108	APBD Kab		45 Paket	26.275.819
1	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Pangandaran	4 Paket	12.195.100	APBD Kab		4 Paket	13.414.610
1	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kec. Pangandaran	6 Dokumen	14.758.536	APBD Kab		6 Dokumen	16.234.390
1	01	206	07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kec. Pangandaran	5 Paket	8.431.921	APBD Kab		5 Paket	9.275.113
1	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Pangandaran	326 Laporan	42.320.000	APBD Kab		326 Laporan	46.552.000
1	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kec. Pangandaran		78.315.698	APBD Kab			86.147.268
1	01	207	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kec. Pangandaran	20 Unit	24.140.366	APBD Kab		20 Unit	26.554.403

1	1	207	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Pangandaran	8 Unit	42.183.310	APBD Kab		8 Unit	46.401.641
1	01	207	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Pangandaran	1 Unit	11.992.022	APBD Kab		1 Unit	13.191.224
1	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kec. Pangandaran		266.086.364	APBD Kab			292.695.000
1	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Pangandaran	240 Laporan	4.050.000	APBD Kab		240 Laporan	4.455.000
1	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Pangandaran	4 Laporan	42.163.000	APBD Kab		4 Laporan	46.379.300
1	1	208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Pangandaran	3 Laporan	219.873.364	APBD Kab		3 Laporan	241.860.700
1	1	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kec. Pangandaran		68.131.945	APBD Kab			74.945.140
1	1	209	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Pangandaran	3 Unit	52.831.945	APBD Kab		3 Unit	58.115.140
1	1	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Pangandaran	14 Unit	12.000.000	APBD Kab		14 Unit	13.200.000
1	1	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Pangandaran	1 Unit	3.300.000	APBD Kab		1 Unit	3.630.000

1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Pangandaran	100	304.572.800	APBD Kab		100	335.030.080
1	2	201		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kec. Pangandaran		279.405.000	APBD Kab			307.345.500
1	2	201	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Pangandaran	12 Laporan	279.405.000	APBD Kab		12 Laporan	307.345.500
1	2	202		<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>		Kec. Pangandaran		25.167.800	APBD Kab			27.684.580
1	2	202	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Pangandaran	12 Kali	25.167.800	APBD Kab		12 Kali	27.684.580
1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Kec. Pangandaran		3.340.000	APBD Kab			3.674.000
1	3	201		<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>		Kec. Pangandaran		3.340.000	APBD Kab			3.674.000
1	3	201	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Pangandaran	8 LSM	3.340.000	APBD Kab		8 LSM	3.674.000

1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Kec. Pangandaran		1.065.000	APBD Kab			1.171.500
1	4	201		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Kec. Pangandaran		1.065.000	APBD Kab			1.171.500
1	4	201	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Pangandaran	8 Laporan	1.065.000	APBD Kab		8 Laporan	1.171.500
1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Kec. Pangandaran		2.040.000	APBD Kab			2.244.000
1	5	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Kec. Pangandaran		2.040.000	APBD Kab			2.244.000
1	5	201	7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kec. Pangandaran	7 Dokumen	2.040.000	APBD Kab		7 Dokumen	2.244.000
1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Kec. Pangandaran		65.819.800	APBD Kab			72.401.780
1	6	201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Kec. Pangandaran		65.819.800	APBD Kab			72.401.780
1	6	201	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Pangandaran	8 Dokumen	14.560.000	APBD Kab		8 Dokumen	16.016.000
1	6	201	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Pangandaran	6 Dokumen	36.959.800,00	APBD Kab		6 Dokumen	40.655.780

1	6	201	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kec. Pangandaran	4 Laporan	14.300.000,00	APBD Kab	4 Laporan	15.730.000
---	---	-----	----	---	--	------------------	-----------	---------------	----------	-----------	------------

Pangandaran, Agustus 2023
 CAMAT PANGANDARAN



DENI RAMDANI, S.Sos
 N.P. 19120928 200212 1 004

BAB IV

PENETAPAN RENJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Pangandaran Tahun Anggaran 2024 program dan kegiatannya di jelaskan dalam RKA Kecamatan Pangandaran Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp 2.550.947.403,-, membidangi:
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berupa Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah berupa penyediaan gaji dan tunjangan ASN, pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD serta koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD;
 - Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah berupa Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD;
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah berupa Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya, koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah berupa penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan bahan/material serta penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah berupa pengadaan mebel, pengadaan peralatan dan mesin lainnya, serta pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berupa penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta penyediaan jasa pelayanan umum kantor;
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berupa penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya serta pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.
- b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Rp 304.598.400,-, membidangi:
- Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan berupa Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan berupa peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan.
- c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Rp 3.381.950,- membidangi:
 - Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa berupa peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa.
- d) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp 1.076.900,- membidangi:
 - Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum berupa Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.
- e) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Rp 2.093.300,- membidangi:
 - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah berupa Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- f) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Rp. 65.887.526,- membidangi:
 - Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa berupa fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di Wilayah Kecamatan.

Dalam hal pendanaan agar pelaksanaan Rencana Kerja yang sudah ditentukan berjalan dengan lancar dan anggaran tersebut terdapat dalam RKA Kecamatan Pangandaran Tahun 2024, dalam pelaksanaan program dan kegiatan seluruhnya menggunakan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2024.

BAB V

PENUTUP

Demikian Penetapan Renja Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran disusun yang merupakan Perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman kepada RPJMD dan bersifat Indikatif selanjutnya akan terus dijabarkan kedalam pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang telah mengacu pada Visi, Misi, arah dan sasaran sehingga dapat dijadikan pedoman bagi seluruh kepentingan yang menjadi media untuk mensinergiskan arah, sasaran dan tahapan dalam melaksanakan Pembangunan, selanjutnya. yang nantinya akan dievaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan Program/Kegiatan di masa yang akan datang. Sehingga dapat diketahui sejauh mana tingkat keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan

Selain itu dukungan dari semua pihak terutama jajaran staf Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, tantangan dan problema yang ada dalam pelaksanaan tugas di berbagai bidang (pendayagunaan sumber daya aparatur) dapat dihadapi secara bersinergi, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Selanjutnya, Penetapan Renja bukan mutlak tetapi harus dievaluasi secara periodik dan disesuaikan dengan perkembangan Kabupaten Pangandaran. Agar pendayaguna aparatur Negara Khususnya di Lingkungan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran nantinya dapat mewujudkan Kecamatan Pangandaran yang terdepan dalam agribisnis dan destinasi wisata yang mendunia dengan tetap mempertahankan agama sebagai pandangan hidup di tahun 2025, dengan rencana Kabupaten Pangandaran untuk **“PANGANDARAN JUARA MENUJU WISATA BERKELAS DUNIA YANG BERPIJAK PADA NILAI KARAKTERISTIK BANGSA”**.

Pangandaran, 28 Juli 2023

CAMAT PANGANDARAN



NENI RAMDANI, S.Sos
NIP. 19710613 200212 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

KECAMATAN PANGANDARAN

**Jalan Raya Pangandaran No. 248 Tlp/Fax (0265) 2640296 Pangandaran
46394**

KEPUTUSAN

CAMAT PANGANDARAN

KABUPATEN PANGANDARAN

Nomor : 045/Kpts.11.1-Kec/2023

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA

KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN ANGGARAN 2024

CAMAT PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terarah, berkesinambungan dan bertanggungjawab maka perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahunan pemerintah daerah serta berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pengesahan Rencana Kerja Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
27. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);

33. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
40. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan;
41. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
42. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan,

- Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38);
43. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 71);
44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 75 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 75);
45. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 77 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 77).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan Penetapan Rencana Kerja Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Rencana Kerja Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi pedoman dalam menyusun Penetapan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.
- KETIGA : Penetapan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran adalah sebagai pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Pangandaran

Pada tanggal : 26 Juli 2023

CAMAT PANGANDARAN



Tembusan disampaikan kepada Yth, :

1. Bupati Pangandaran.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran.
3. Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran.
4. Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN CAMAT PANGANDARAN
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 050/Kpts.11.1-Kec/2023
TANGGAL : 26 Juli 2023

**PENETAPAN RENCANA KERJA
KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

- A. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran
1. Kecamatan Pangandaran
- B. Sistematika Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dengan sistematika sebagai berikut:
- I. Pendahuluan
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
 - II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
 - 1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
 - 1.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 1.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 1.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
 - III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
 - 3.3. Program dan Kegiatan
 - IV. Renja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - V. Penutup
- C. Program dan Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Pangandaran Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Pangandaran telah sesuai dengan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

PARAF HIERARKI/KOORDINASI			
NO	PEJABAT	TGL	PARAF
1	SEKMAT		
2	KASUBAG KEUANGAN		

CAMAT PANGANDARAN


DENI RAMDANI, S.Sos

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan pada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran untuk Tahun anggaran 2024.

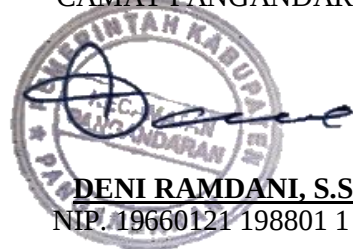
Rancangan Rencana Kerja (Renja) ini merupakan langkah awal penentuan indikator kinerja yang dapat terukur secara kuantitatif maupun kualitatif sebagai gambaran tingkat pencapaian dan tingkat keberhasilan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) ini kami berupaya semaksimal mungkin walaupun dalam prosesnya selalu mengalami hambatan serta keterbatasan, harapan kami semoga Rancangan Rencana Kerja(Renja) ini dapat dijadikan acuan oleh semua pihak yang berkepentingan sehingga dapat dirasakan manfaatnya dalam upaya pencapaian hasil yang terbaik untuk tiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 ini, kami sadari masih jauh dari sempurna dan masih terdapat kekurangan didalamnya, untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya serta kami berharap ada masukan ataupun saran yang membangun guna perbaikan dan peningkatan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) di masa yang akan datang.

Akhirnya, besar harapan kami semoga dengan tersusunnya Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 ini dapat menjadi media informasi yang berguna serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja pada Kantor Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.

CAMAT PANGANDARAN



DENI RAMDANI, S.Sos
NIP. 19660121 198801 1 002

DAFTAR ISI

	Hal
KEPUTUSAN CAMAT PANGANDARAN	i
.....	ix
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	1
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	6
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH	
TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	9
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	13
2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI	
PERANGKAT DAERAH	13
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD	14
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
MASYARAKAT	23
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	24
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	24
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH	25
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN	25
BAB IV RENJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	34
BAB V PENUTUP	36